GUNTINGAN BERITA

Surat Kabar : **Suara Pembaruan** **Tanggal** : **10 mei 2007**
Subyek : **Pengelolaan hutan** **Hari** : **Kamis**
Halaman : **12**

Walhi Sulteng Minta Moratorium Pengelolaan Hutan

[PALU] Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Tengah (Sulteng) meminta pemerintah mengeluarkan kebijakan moratorium atas izin-izin eksploitasi hutan, baik dalam bentuk hak pengusahaan hutan (HPH), izin pemanfaatan kayu (IPK), izin usaha pengelolaan hasil hutan kayu (IUPHHK). Dinilai eksploitasi hutan menjadi penyebab makin tak terkendalinya kerusakan hutan.

"Bencana bencana banjir yang terus-menerus melanda wilayah di Sulteng bahkan intensitasnya makin meningkat, memberikan bukti betapa kawasan hutan kita sudah sangat rusak. Harus ada kesungguhan pemerintah menyelamatkan hutan yang rusak," kata Wilianita Selviana, Koordinator Divisi Advokasi Walhi Sulteng kepada *SP* di Palu, Rabu (9/5).

Kebijakan pemerintah yang sangat liberal memberikan legalisasi terhadap eksploitasi hutan, telah mempercepat perubahan tutupan hutan yang cenderung mengarah pada kerusakan. Di Sulteng, eksploitasi hutan dengan menggunakan izin HPH, IPK, dan IUPHHK, dimanfaatkan untuk menghabisi kayu-kayu secara tak terkendali, katanya.

Dikatakan, bencana banjir yang melanda Kota Palu, Kabupaten Donggala, Morowali, Parigi Moutong dan Tojon Una-una di Sulteng, sebagai buah yang harus dipetik dari aktivitas kerusakan hutan secara terstruktur dan mendapat "legitimasi" pemerintah.

Data Walhi Sulteng, selain aktitivitas HPH, IPK dan IUPHHK, aktivitas pembalakan liar di hulu daerah aliran sungai (DAS) pada wilayah-wilayah yang tertimpa bencana banjir tersebut sudah sangat parah. Ironisnya pemda setempat membiarkannya, tak ada kesungguhan menghentikannya.

Walhi Sulteng juga meminta pemerintah meninjau kembali status hutan khususnya di Sulteng. "Harus didata kembali berapa luas tutupan kawasan hutan, konsesi, dan kapasitas produksi secara berkelanjutan," tandasnya.

Sementara itu banjir di Palu, Donggala, Parigi Moutong saat ini sudah mulai surut. Warga mulai kembali ke pemukimannya, dan pemda setempat masih melakukan pendataan berbagai kerusakan akibat banjir. Di Palu, lebih dari 500 meter tanggul pengaman di DAS Palu jebol akibat banjir dengan kerugian mencapai puluhan miliar.

Wali Kota Palu, Rusdy Mastura mengatakan, pihaknya masih mengkoordinasikan semua kerusakan dengan instansi teknis dan mencari jalan keluar untuk perbaikannya. [128]

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup